

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Association of South East Asian Nations (ASEAN) dan Tiongkok membentuk sebuah kerjasama ekonomi yang disebut dengan *ASEAN-China Free Trade Area* atau yang biasa disingkat dengan ACFTA. ACFTA berisi kesepakatan negara-negara anggota ASEAN dengan Tiongkok untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, serta meningkatkan prospek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Tiongkok. ACFTA pertama kali ditandatangani pada bulan November tahun 2002 dan diterapkan secara penuh sejak bulan Januari tahun 2010.¹

ACFTA mengatur beberapa aspek yaitu; perdagangan, agrikultur, perikanan, kehutanan, teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, hak intelektual serta lainnya.² Pengaturan dalam beberapa aspek tersebut mendorong terjadinya perdagangan bebas. Perdagangan bebas tersebut ditujukan untuk membentuk *balance of trade equilibrium* atau keseimbangan perdagangan bagi seluruh negara anggota ASEAN dengan Tiongkok. ACFTA yang telah disepakati ini, mengharuskan

¹ Direktorat Kerjasama Regional, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, *ASEAN-China Free Trade Area* (Jakarta: Kemendag, 2010), pdf.

²Association of Southeast Asian Nations, *ASEAN-China Free Trade Agreement*, (ASEAN, 2012), http://asean.org/?static_post=asean-china-free-trade-area-2 (diakses pada 21 Desember 2016).

Tiongkok dan negara anggota ASEAN untuk mengadopsi kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati di dalam ACFTA tersebut. Indonesia, sebagai negara anggota terbesar di ASEAN, telah mengimplementasikan ACFTA ke dalam beberapa kebijakan dalam negerinya dari awal.

Indonesia diprediksi menjadi negara yang akan mengalami penambahan impor terbesar dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Bahkan, untuk penambahan jumlah impor barang-barang elektronik Indonesia diprediksi bertambah sebesar 292,20 juta dolar Amerika Serikat (AS). Jumlah ini lebih tinggi dari negara anggota ASEAN yang hanya mencapai 113,89 dolar AS.³ Berdasarkan prediksi ini, peneliti menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mengalami kerugian terbesar dibandingkan dengan negara lainnya, baik nilai impor secara keseluruhan, maupun dalam sektor industri elektronik.

Sebelum diberlakukannya ACFTA, struktur perekonomian Indonesia didominasi oleh sektor industri dalam negeri, yaitu sebanyak 24,8%.⁴ Hal ini menjadi prestasi bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang melakukan industrialisasi ekonomi dalam berbagai aspek. Hingga saat ini, persentasi kontribusi sektor industri masih menjadi sumbangsih yang paling besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Sehingga, dapat dikatakan

³ Adrian D. Lubis, "Analisis Kinerja Perdagangan Sektor Elektronik Sebelum dan Setelah Pelaksanaan ACFTA," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 4, no. 2 (November 2010): 236.

⁴ Suara Pembaruan, Sektor Industri Masih Dominasi Perekonomian Indonesia, *Berita Satu* (Jakarta: 2011), <http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/sektor-industri-masih-dominasi-perekonomian-indonesia/3479> (diakses pada 18 Januari 2018).

bahwa sektor industri merupakan sektor yang paling berpotensi dan paling berpengaruh dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia saat ini.

Kontribusi dari sektor industri terhadap PDB Indonesia dihitung dari jenis industri migas dan non migas yang ada di Indonesia. Selain migas, industri yang menjadi penyokong PDB Indonesia terbesar adalah industri makanan dan minuman, yakni sebesar 30,84% dan posisi kedua ditempati oleh industri barang logam dan barang elektronik sebesar 10,81%.⁵ Data ini menjelaskan bahwasanya, industri elektronik merupakan salah satu industri yang cukup berpengaruh di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas barang-barang elektronik agar dapat menjadi lebih unggul dalam bersaing dengan produk-produk elektronik yang berasal dari luar negeri.

Hubungan kerjasama ekonomi Indonesia dengan Tiongkok semakin intim setelah berlakunya ACFTA.⁶ Intimisasi kerja sama ekonomi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kedua belah pihak. Namun faktanya, berbagai tantangan besar dialami oleh Indonesia setelah mengimplementasikan ACFTA. Salah satu tantangan berat yang dihadapi Indonesia adalah tidak seimbang nya neraca perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok setelah diberlakukannya ACFTA.

⁵ Bisnis Indonesia, "Kontribusi Industri Manufaktur Melesat," *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia* 2015, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14532/Kontribusi-Industri-Manufaktur-Melesat> (diakses pada 20 September 2017).

⁶ Ragimun, "Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA," *Kementerian Keuangan*, (2016): 12.

Pada tahun 2011, nilai impor Indonesia dari Tiongkok adalah 35,1%, nilai ini melonjak cukup signifikan dari dua tahun sebelumnya yang hanya bernilai 21,1%.⁷ dalam kurun dua tahun, Tiongkok sudah dapat meningkatkan nilai impornya sebesar 14,1%. Peningkatan nilai impor Indonesia dari Tiongkok tersebut tidak diiringi dengan peningkatan nilai ekspor, sehingga menimbulkan selisih perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok yang menyebabkan defisit bagi Indonesia.

Jumlah ekspor Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2011 adalah sebesar 18,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS), sedangkan nilai jumlah impor Indonesia dari Tiongkok adalah sebanyak 25,7 miliar dolar AS.⁸ Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat selisih perdagangan Indonesia dan Tiongkok sebesar 7,5 miliar dolar AS. Selisih ini bernilai negatif karena jumlah impor Indonesia lebih besar dari pada jumlah ekspor, sehingga pada tahun 2011 Indonesia telah mengalami defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok.

Pada tahun yang sama, produktivitas industri sektor non migas, termasuk industri elektronik, hanya menyumbang sekitar 21,6% terhadap PDB Indonesia.⁹ Jumlah ini dinyatakan lebih sedikit daripada jumlah rata-rata tahun sebelumnya yaitu 24,8%. berkurangnya produktivitas industri nonmigas terhadap PDB Indonesia ini menjadi

⁷ Suara Pembaruan, "Sektor Industri Masih Dominasi Perekonomian Indonesia," *Berita Satu* 2011, <http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/sektor-industri-masih-dominasi-perekonomian-indonesia/3479> (diakses pada 18 Januari 2018).

⁸ Sigit Setiawan, "ASEAN-China FTA: Dampaknya terhadap Ekspor Indonesia dan Cina," *Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral 2*, (2014): 140.

⁹ Suara Pembaruan, "Sektor Industri Masih Dominasi Perekonomian Indonesia," *Berita Satu* 2011, <http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/sektor-industri-masih-dominasi-perekonomian-indonesia/3479> (diakses pada 18 Januari 2018).

salah satu data yang membuktikan tidak efektifnya implementasi ACFTA di Indonesia.

Komoditas utama impor Indonesia dari Tiongkok adalah barang elektronik dan telekomunikasi.¹⁰ Melalui ACFTA, barang-barang elektronik dari Tiongkok dapat lebih bebas memasuki pasar. Barang-barang elektronik asal Tiongkok saat ini menempati jumlah terbesar di dalam pasar domestik Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan semakin beratnya persaingan antara produk elektronik buatan dalam negeri dengan produk elektronik buatan Tiongkok.

Impor produk elektronik Indonesia dari Tiongkok terus mengalami peningkatan yang signifikan, terutama selama tahun 2010-2015. Rata-rata kenaikan nilai impor produk elektronik Tiongkok ke Indonesia adalah 59,31% setiap tahunnya. Jumlah tersebut terbilang jauh lebih fantastis dibandingkan dengan jumlah impor produk elektronik asal Tiongkok di Indonesia sebelum diberlakukannya ACFTA. Produk elektronik terbanyak yang diimpor dari Tiongkok adalah laptop dan telepon seluler. Dua jenis produk elektronik ini bahkan mencapai total nilai impor Rp. 59 triliun pada tahun 2011.¹¹

Wakil Menteri Perindustrian, Alex S.W Retraubun, menyatakan bahwa kerja sama perdagangan Indonesia dengan Tiongkok melalui ACFTA menimbulkan

¹⁰ Rzn/hp, "Komoditas Impor Terbesar Indonesia," DW, 2016, <http://www.dw.com/id/komoditas-impor-terbesar-indonesia/g-19444043> (diakses pada 25 Januari 2018).

¹¹ Harian Ekonomi Neraca, "Import Produk Elektronika Meningkatkan Tajam," *Kementrian Perindustrian Republik Indonesia* 2016, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/4195/Impor-Produk-Elektronika-Meningkat-Tajam> (diakses pada 20 Desember 2016).

kerugian besar bagi negara Indonesia.¹² Kerugian tersebut terjadi karena melonjaknya nilai impor Indonesia dari Tiongkok. Perlonjakan nilai impor terbanyak terjadi pada impor barang-barang elektronik. Sehingga, pasar domestik Indonesia terus dibanjiri oleh barang-barang asal Tiongkok, khususnya barang elektronik.

Seorang pakar ekonomi, A Prasetyantoko, mengungkapkan bahwa ACFTA dapat mengakibatkan deindustrialisasi di Indonesia.¹³ Hal ini diakibatkan oleh kondisi perdagangan yang tidak seimbang dan kurangnya pemahaman pemerintah terhadap kesepakatan yang ada dalam ACFTA. Akibatnya, Indonesia tidak mampu menemukan strategi solutif untuk mengimbangi jumlah ekspor dan impor antara Indonesia dan Tiongkok. Kondisi ini juga diperburuk dengan kurangnya kapasitas ekonomi Indonesia untuk bersaing dengan Tiongkok.

Semenjak implementasi penuh ACFTA, Indonesia mengalami gejolak dalam perekonomiannya. Perubahan yang paling signifikan yang dirasakan oleh Indonesia adalah tingginya jumlah impor barang-barang asal Tiongkok, khususnya barang elektronik. Peningkatan jumlah impor ini tidak diimbangi dengan jumlah ekspor dan strategi solutif yang dapat mencegah terjadinya defisit neraca perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Kondisi ini berkebalikan dengan tujuan implementasi ACFTA untuk menciptakan keseimbangan neraca perdagangan antara Indonesia dan

¹² Harian Ekonomi Neraca, "Lalai, Dampak Buruk ACFTA, Indonesia Kebanjiran Produk Cina," *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*, 2016, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3817/Lalai-Dampak-Buruk-ACFTA,-Indonesia-Kebanjiran-Produk-Cina> (diakses pada 29 Januari 2018).

¹³ Ibid.

Tiongkok. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ACFTA tidak efektif terhadap industri elektronik Indonesia.

ACFTA merupakan rezim internasional yang telah diikuti oleh Indonesia dalam wadah ASEAN. ACFTA adalah rezim perdagangan internasional yang mengatur berbagai aspek, salah satunya perdagangan bebas produk dari industri elektronik. Industri elektronik merupakan salah satu industri yang memiliki sumbangsih cukup besar terhadap PDB Indonesia. Setelah implementasi ACFTA, industri elektronik Indonesia mengalami penurunan produktivitas, bahkan mengalami defisit perdagangan dengan Tiongkok. Hal ini menyatakan bentuk ketidakefektifan implementasi ACFTA bagi industri elektronik di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Implementasi ACFTA ditujukan untuk memajukan perekonomian Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN. Setelah diberlakukannya ACFTA, intensitas perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok meningkat drastis, terutama aktivitas ekspor-impor barang-barang elektronik. Bersamaan dengan penerapan ACFTA, produktivitas industri elektronik Indonesia menurun, sedangkan impor produk elektronik asal Tiongkok di Indonesia meningkat secara signifikan. Ketidakseimbangan impor dan ekspor tersebut menyebabkan defisit neraca perdagangan bagi Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi ACFTA tidak efektif terhadap industri elektronik Indonesia. Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka peneliti membahas permasalahan terkait dengan penyebab tidak efektifnya ACFTA tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang **mengapa ASEAN Free Trade Agreement (ACFTA) tidak efektif terhadap industri elektronik di Indonesia?**

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan yang menjadi penyebab tidak efektifnya ACFTA terhadap industri elektronik di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum, penelitian ini akan menambah wawasan bagi pembaca.
2. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan referensi bagi pembaca untuk melakukan penelitian yang sama atau melanjutkan penelitian ini.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang berhubungan dengan isu yang diteliti.

1.6 Kajian Pustaka

Untuk menganalisis judul yang diangkat, penulis berusaha untuk mencari acuan pada beberapa kajian pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut akan menjadi tolak ukur dan landasan bagi penulis

dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. Berikut ini adalah lima kajian pustaka yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti.

Kajian pustaka yang pertama adalah artikel yang ditulis oleh Aziza R. Salam dan Bagas Haryotejo.¹⁴ Artikel ini berisi mengenai efektifitas dari penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk *electronic and electric equipment* (EEE) Indonesia agar dapat mencegah terjadinya pembajakan produk EEE dari Tiongkok di pasar dalam negeri serta melindungi konsumen Indonesia setelah diberlakukannya ACFTA. Pustaka ini menggunakan teori kebijakan standarisasi Indonesia dalam menganalisis dua tujuan utama penulisan di atas. Permasalahan di dalam pustaka ini dianalisis melalui peninjauan kebijakan *ASEAN-China Free Trade Agreement* yang diterapkan di Indonesia. Hasil dari pustaka ini adalah penerapan SNI bagi produk-produk elektronik yang diperdagangkan di Indonesia dan pengurangan tarif terhadap produk EEE kurang efektif. Berbeda dengan kajian pustaka pertama, penelitian ini ditujukan untuk menemukan alasan-alasan yang menjadi penyebab tidak efektifnya ACFTA terhadap industri elektronik Indonesia.

Pustaka kedua ditulis oleh Martinah yang membahas mengenai strategi pemerintah Indonesia dalam menepis kekhawatiran akan dominasi produk-produk telepon genggam buatan Tiongkok di dalam pasar lokal yang kemungkinan akan menyebabkan penurunan daya saing produk-produk telepon genggam seperti IMO, Nexian, Vitell, Axio, Evercross, Smartfren dan Polytron yang dikembangkan di

¹⁴ Aziza R. Salam dan Bagas Haryatejo, "Dampak Ekonomi ASEAN-China FTA terhadap Produk Elektronik Indonesia," *Jurnal Standarisasi* 13, no. 3 (2011).

Indonesia.¹⁵ Bahasan dalam pustaka ini dianalisis berdasarkan teori Kepentingan dan Institusi serta teori Industrialisasi Orientasi Ekspor (IOE) dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif analisis berupa pemberian gambaran tentang strategi pemerintah Indonesia menghadapi produk telepon genggam Tiongkok di dalam ACFTA. Data dari pustaka kedua ini dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data yang sama dengan penelitian ini, studi pustaka, yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan diperoleh dari beberapa literatur yang sah dan resmi berupa buku, majalah, internet, koran, jurnal ataupun lainnya.

Hasil analisis pustaka kedua ini adalah penjabaran strategi-strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi penyebaran telepon genggam Tiongkok di Indonesia berupa: (1) penciptaan teknologi padat karya berupa industri yang mampu menyerap tenaga kerja dan pengaplikasian sistem keuntungan komparatif ekonomi, (2) promosi penggunaan produk-produk dalam negeri melalui berbagai media cetak maupun elektronik dengan *tagline* “cintailah produk-produk Indonesia!”, “aku bangga menggunakan produk dalam negeri” dan berbagai *tagline* lainnya, (3) penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi setiap produk telepon genggam buatan dalam negeri, (4) pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada produk telepon genggam yang dikategorikan sebagai barang mewah, terutama produk-produk telepon genggam buatan negara asing. Berbeda dengan pustaka kedua, penelitian ini berjenis eksplanatif analisis serta menggunakan konsep rezim internasional dan efektivitas rezim dalam menganalisis masalah yang diteliti.

¹⁵ Martinah, “Strategi Indonesia Menghadapi Produk *Handphone* China dalam Perdagangan Bebas ACFTA,” *Ejournal Hubungan Internasional* 2, no. 4 (2014).

Pustaka ketiga ditulis oleh Sigit Setiawan bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh atau dampak dari keikutsertaan Indonesia dan Tiongkok dalam perjanjian perdagangan barang dalam ACFTA dari sisi kontribusi ekspor dan peningkatan pertumbuhannya.¹⁶ Kerangka teoritis yang digunakan dalam pustaka ini didasarkan pada kajian Llyod dan MacLaren (2004) dan kajian Dee (2011) serta didukung oleh teori dan model *preferential trade* dalam Markusen (1995). Studi Llyod dan MacLaren memaparkan bahwa terdapat tiga variabel endogen dalam menganalisis FTA terhadap ekspor suatu negara, yaitu; (1) pendapatan nasional, (2) *terms of trade*, dan (3) kesejahteraan; memiliki kaitan erat dengan penilaian dampak suatu FTA terhadap negara-negara anggota dan non anggota. Pustaka ini berfokus pada dampak ACFTA terhadap ekspor Indonesia dan Tiongkok. Berbeda dengan penelitian Setiawan, penelitian ini ditulis untuk menjelaskan efektivitas ACFTA terhadap sektor industri elektronik di Indonesia.

Pustaka keempat ditulis oleh Ivan Lim dan Philip Kauppert yang membahas tentang situasi dilema politik Indonesia yang timbul akibat diberlakukannya ACFTA untuk memperoleh *win-win solution* setelah penerapan ACFTA di Indonesia.¹⁷ Dilema politik yang muncul dari ACFTA adalah, selain memberi dampak positif dan berpeluang pasar yang lebih besar, ACFTA juga bisa menjadi bumerang bagi Indonesia jikalau Indonesia tidak mampu menghadapinya. Hasil dari kajian pustaka ini adalah penerapan beberapa strategi oleh negara Indonesia untuk mengatasi dilema politik yang ada. Strategi tersebut terdiri dari peninjauan kembali sistem tarif

¹⁶ Sigit Setiawan: pdf.

¹⁷ Ivan dan Philip Kauppert, "Dilema Politik Menghadapi ACFTA: Apa Pilihan untuk Indonesia?," *Jurnal Sosial Demokrasi* 8, no. 3 (2010).

terhadap produk asing, penetapan standar SNI bagi setiap produk yang beredar dalam pasar domestik, memberikan jaminan sosial yang efektif terhadap investasi yang masuk ke Indonesia, dan strategi-strategi lainnya.

Pustaka kelima adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Jati Andrianto, Aditya Perdana Putra dan Fajar Adrianto yang menjelaskan tentang ciri-ciri dan contoh sektor-sektor yang berpeluang serta sektor-sektor yang berkemungkinan terancam dengan pemberlakuan ACFTA.¹⁸ Hasil dari kajian pustaka ini adalah: (1) ciri-ciri sektor yang berpeluang memiliki daya saing yang tinggi dalam ACFTA adalah mampu menjadi penopang ekonomi domestik, memiliki basis industri yang kukuh tidak masuk ke dalam pos penundaan ACFTA, berpikir berdasarkan indeks keuntungan komparatif yang cukup tinggi serta tingkat ekspor yang tak terganggu dengan adanya ACFTA, (2) ciri-ciri sektor yang terancam adalah sektor-sektor yang memiliki perangkat undang-undang dan kebijakan yang masih lemah, memiliki basis industri yang lemah dari hulu ke hilir serta ekspor terganggu dengan adanya penerapan ACFTA. Pustaka ke lima ini berfokus pada pemetaan sektor-sektor yang berpeluang dalam bersaing melalui ACFTA, sedangkan penelitian ini berfokus pada penemuan alasan ketidakefektifan ACFTA terhadap industri elektronik di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat dilihat bahwa kelima kajian pustaka di atas memiliki berbagai perbedaan fokus kajian dalam setiap permasalahan yang diteliti satu sama lainnya. Penelitian ini juga memiliki perbedaan fokus kajian dari kelima kajian pustaka yang penulis paparkan sebelumnya. Perbedaan tersebut adalah

¹⁸ Jati Andrianto, Aditya Perdana Putra dan Fajar Adrianto, "Memetakan Sektor Berpeluang dan Terancam," *Jurnal Sosial Demokrasi* 8, no. 3 (2010).

penelitian ini lebih berfokus terhadap variabel rezim perdagangan internasional yang diimplementasikan dalam negara yang mengikuti rezim tersebut; efektivitas ACFTA terhadap sektor industri elektronik Indonesia.

1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran konsep yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua konsep yang berhubungan dengan rezim internasional. Kedua konsep tersebut adalah sebagai berikut.

1.7.1 Rezim Internasional

Rezim Internasional merupakan sekumpulan prinsip, norma, aturan, dan proses pembuatan kebijakan yang disusun sesuai dengan tujuan aktor pada suatu bidang tertentu dalam hubungan internasional.¹⁹ Prinsip, norma, aturan dan proses pembuatan kebijakan tersebut diimplikasikan secara eksplisit atau implisit. Konsep rezim internasional menjelaskan tentang upaya atau sarana regulasi yang melintasi batas beberapa negara.

Rezim internasional dapat ditelaah dari perspektif neorealisme, neoliberalisme dan kognitivisme.²⁰ Pada perspektif neorealisme, rezim internasional merupakan wadah bagi negara sebagai aktor internasional untuk mendistribusikan *power* yang

¹⁹ Stephen Krasner, "Structural Causes and Regimes Consequences: Regimes as Intervening Variables," *International Organization* volume 2 no. 36 (1982): 185.

²⁰ Hasen Clever, Peter Meyer dan Volker Rittberger, *Theories of International Regimes* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), pdf.

dimiliki pada relasi power yang terjadi dalam sistem internasional. Sedangkan dalam perspektif neoliberalisme, rezim internasional dibentuk atas dasar persamaan kepentingan (*Common Interest*) antar aktor yang mengikuti rezim tersebut. Rezim dalam perspektif kognitivisme dijelaskan sebagai aturan yang dibentuk berdasarkan pendekatan pengetahuan.

ACFTA merupakan seperangkat aturan yang dibentuk di bawah organisasi ASEAN yang merangkum standar prosedural pembuatan kebijakan, dan penyelesaian sengketa. Berdasarkan pengertian dari Krasner, ACFTA termasuk sebagai salah satu rezim internasional yang mengatur perdagangan internasional antara negara-negara anggota ASEAN dan negara Tiongkok. ACFTA dalam penelitian ini ditelaah berdasarkan perspektif neoliberalisme, yaitu perspektif yang menelaah rezim berdasarkan kepentingan ataupun tujuan bersama yang ingin dicapai oleh beberapa aktor internasional melalui sarana regulasi yang melintasi batas negara.

1.7.2 Efektivitas Rezim

Efektivitas rezim merupakan bentuk keberhasilan suatu rezim yang diukur dari usaha membangun kerja sama dan pengimplementasian rezim yang sesuai dengan fungsinya dalam menyelesaikan isu yang memotivasi dibentuknya rezim tersebut.²¹ Implementasi rezim dicerminkan dari perilaku aktor-aktor yang terikat dengan rezim. Bentuk implementasi dan pelaksanaan fungsi rezim pada masalah yang diselesaikan menjadi ukuran berhasil atau gagalnya suatu rezim. Dalam analisis penelitian

²¹ Arild Underdal, *Explaining Regime Effectiveness*, (Norwegia: Press Universitas Oslo, 1987), pdf.

Underdal, efektivitas rezim merupakan variabel dependen.²² Efektivitas rezim dipengaruhi oleh variabel independen berupa tipe permasalahan dan kapasitas aktor. Tipe permasalahan merupakan berbagai masalah yang dihadapi rezim, sedangkan kapasitas aktor adalah kemampuan yang dimiliki aktor untuk menyelesaikan permasalahan dalam rezim.

Untuk menjelaskan variabel independen tersebut, terdapat tiga komponen utama, yaitu *level of collaboration* (Tingkat kolaborasi), *problem malignancy* (kerumitan permasalahan) dan *problem solving capacity* (kapasitas penyelesaian masalah).²³ Variabel berupa tipe permasalahan dijelaskan dengan menggunakan komponen kerumitan masalah, sedangkan variabel kapasitas aktor dijelaskan dengan menggunakan komponen tingkat kolaborasi dan kapasitas penyelesaian masalah.

1.7.2.1 Tingkat Kolaborasi (*Level of Collaboration*)

Menurut Underdal, efektivitas rezim yang ditelaah berdasarkan hubungan sebab-akibat yang menjadi suatu peristiwa dari *output* (keluaran), *outcome* (hasil) dan *impact* (dampak) merupakan titik awal analisis masalah.²⁴ *Output* merupakan rezim yang berupa seperangkat aturan dasar yang muncul dari proses pembentukan dan ditandatangani bersama. *Outcome* adalah implementasi rezim bagi setiap aktor yang terikat. Implementasi merupakan bentuk penyesuaian perilaku aktor dalam

²² Arild Underdal, et al, *Environmental Rezime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*, (Cambridge: MIT Press, 2001), pdf.

²³ Miles, Edward L., et al, *One Question, Two Answers*, (Cambridge: MIT Press, 2002), pdf.

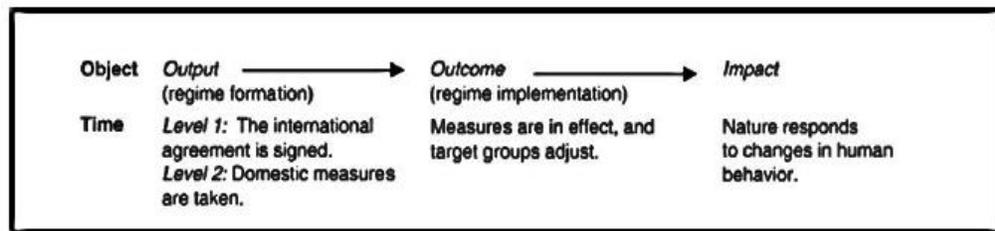
²⁴ Shella Aprilia, "Efektivitas Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery (ReCAAP) dalam Penanganan Kasus pembajakan Kapal dan Perampokan Bersenjata di Asia Tenggara Tahun 2012-2015, *Jurnal Online Mahasiswa FISIP 4*, no. 1 (2017): pdf.

menerapkan kebijakan dengan rezim yang dipatuhi. *Impact* merupakan respon dari anggota rezim yang mengubah perilaku rezim terhadap suatu kondisi tertentu.

Objek penilaian dari level kolaborasi sebuah rezim diukur dari tingkatan intensitas kerja sama dianalisis berdasarkan proses *output*, *outcome*, dan *impact* tersebut. Setiap proses memiliki kaitan satu sama lainnya. Dan setiap proses ini juga menjadi tolak ukur tingkatan kolaborasi yang dimiliki oleh sebuah rezim.

UNIVERSITAS ANDALAS

Gambar 1.1
Objek Penilaian (*object of Assesment*)



Sumber: Arild Underdal (n.d)

Teori efektivitas rezim Underdal menetapkan enam jenis skala ordinal rezim, yaitu:

1. Skala 0 adalah *joint deliberation but no joint action* (rezim memiliki gagasan bersama tanpa adanya tindakan bersama).
2. Skala 1 adalah *coordination of action on the basis of tacit understanding* (koordinasi tindakan dengan pemahaman secara diam-diam)
3. Skala 2 adalah *coordination of action on the basis of formulated rules or standards but with implementation fully in the hands of national government* (koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit, namun implementasi sepenuhnya diatur oleh pemerintahan).

4. Skala 3 adalah *same as level 2 but including centralized appraisal* (koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit, namun implementasi diatur oleh pemerintah dengan penilaian terpusat).

5. Skala 4 adalah *Coordinated planning combined with national implementation only including centralized appraisal of effectiveness* (perencanaan yang terkoordinasi dikombinasikan hanya dengan implementasi pada level nasional, termasuk adanya penilaian terpusat terhadap efektifitas sebuah tindakan).

6. Skala 5 adalah *coordination through fully integrated planning and implementation with centralized appraisal of effectiveness* (koordinasi melalui perencanaan dan implementasi yang menyeluruh dan terintegrasi, dengan penilaian terpusat terkait efektivitas suatu tindakan).

Output dianalisis berdasarkan proses perumusan sebuah rezim.²⁵ Sebuah rezim dapat dikatakan telah memiliki *output* adalah ketika negara-negara anggota telah menandatangani kesepakatan yang dirumuskan bersama. Unsur *output* dalam sebuah rezim menentukan tingkat kolaborasi rezim tersebut yang berada pada skala satu atau dua.

Unsur *outcome* berfokus kepada implementasi kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam rezim yang sudah ditandatangani.²⁶ Pelaksanaan implementasi tersebut berhubungan dengan penambahan target dan hasil yang harus dicapai rezim dalam kurun waktu tertentu. Selama waktu yang ditetapkan tersebut, pemerintah memiliki

²⁵ *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and The People's Republic of China*, Phnom Penh, 2002, www.asean.org/13196.htm(diakses pada 25 Mei 2018).

²⁶ Miles, Edward L., et al, pdf.

kontrol penuh terhadap implementasi yang dilakukannya. Keenam skala ordinal di atas merupakan gambaran terhadap tingkatan kolaborasi negara dengan rezim internasional yang diikuti sesuai dengan garis besar pengaturan yang disepakati di dalam rezim. Ketika sebuah rezim telah memiliki *outcome*, maka rezim tersebut telah berada pada tingkat kolaborasi pada skala satu atau dua.

Unsur *impact* merupakan unsur yang menyatakan tentang adanya dampak atau akibat dari implementasi sebuah rezim terhadap perilaku aktor yang terikat dengan rezim.²⁷ Adanya perubahan perilaku aktor terhadap sebuah rezim menimbulkan beberapa penilaian terkait dengan implementasi rezim yang telah dilaksanakan. Penilaian tersebut berupa evaluasi terhadap efektivitas tindakan aktor dalam mematuhi rezim yang diikuti. Ketika sebuah rezim telah memiliki unsur *impact*, maka rezim tersebut telah mencapai tingkat kolaborasi pada skala empat atau lima.

1.7.2.2 Kerumitan Masalah (*Problem Malignancy*)

Suatu rezim dapat dinilai dari masalah yang dihadapinya.²⁸ Setiap masalah memiliki karakter tersendiri. Sebagian masalah secara politis bersifat rumit, sedangkan sebagian yang lain cukup mudah untuk diselesaikan secara politis maupun non politis. Penelitian ini fokus membahas tentang kerumitan masalah-masalah politis dalam hubungan internasional melalui sebuah rezim. Semakin rumit permasalahan yang dihadapi suatu rezim, maka semakin sulit untuk menciptakan kerja sama yang efektif di antara aktor-aktor pengikut rezim. Sebuah rezim cenderung tidak efektif

²⁷ Arild Underdal, et al, pdf.

²⁸ Ibid.

apabila tingkat kerumitan masalah yang dihadapi tinggi, sebaliknya rezim akan cenderung lebih efektif apabila tingkat kerumitan masalah rendah.

Masalah yang tidak rumit adalah masalah yang memiliki preferensi yang sama, sedangkan masalah sulit adalah masalah yang jauh dari *state harmony* atau keselarasan tujuan negara-negara anggota rezim.²⁹ Kerumitan masalah secara umum dapat dipahami secara primer dari konfigurasi kepentingan aktor-aktor yang terikat dengan rezim serta pilihan yang diambil dalam mematuhi rezim. Cara masing-masing negara dalam mematuhi sebuah rezim terkadang berbeda. Perbedaan tindakan tersebut dapat merusak efektivitas rezim yang diikuti. Dengan demikian, semakin indetik pilihan yang dimiliki aktor-aktor rezim, maka semakin mudah memperoleh solusi masalah, sebaliknya semakin berbeda pilihan yang diambil oleh aktor-aktor dalam menyelesaikan permasalahan, maka akan semakin sulit masalah tersebut diselesaikan melalui sebuah rezim.

Dalam implementasi sebuah rezim, juga terdapat kondisi ketidakselarasan permasalahan yang dialami oleh negara anggota. Ketidakselarasan masalah ini disebut sebagai masalah ketidakselarasan (*problem of incongruity*). *Problem of incongruity* merupakan sebuah kondisi yang menyebabkan munculnya permasalahan dari berbagai aspek setelah implementasi rezim.

Masalah ketidakselarasan disebabkan oleh eksternalitas dan kompetisi. Ekternalitas adalah suatu keadaan ketika masalah suatu aktor merembes dan yang mempengaruhi aktor lain dalam berbagai aspek, sedangkan kompetisi muncul akibat kesejahteraan aktor (dalam berbagai aspek) secara subjektif dibandingkan dengan

²⁹ Arild Underdal, et al, pdf.

aktor lainnya. Kompetisi ini dapat berdampak sebagai bumerang bagi tindakan dan pilihan yang diambil aktor dalam mengikuti rezim internasional.³⁰

Setiap hal yang diperoleh dalam hubungan internasional didasari oleh keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh aktor. Untuk mencapai tujuan rezim yang efektif, maka keputusan dan tindakan antar aktor yang terikat harus diselarasakan. Jika masing-masing aktor hanya mengutamakan pencapaian kepentingan sendiri, maka akan menyebabkan ketidakefektifan rezim (*poor outcomes*).

Kerumitan masalah tidak dapat diidentifikasi secara rinci dan absolut. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya klasifikasi masalah yang jelas dalam rezim internasional. Meskipun demikian, masalah dalam rezim internasional dapat diukur dengan menganalisis keselarasan perilaku dan keputusan aktor yang mengikuti rezim tersebut.

1.7.2.3 Kapasitas Penyelesaian Masalah (*Problem Solving Capacity*)

Kapasitas penyelesaian masalah yang digagas oleh Underdal ditentukan oleh tiga hal, yaitu:

- a. Pengaturan kelembagaan (*the setting institution*)

Pengaturan kelembagaan mengacu kepada konstelasi aturan yang ada dengan hak yang diterjemahkan melalui praktik sosial, pemberian peran dalam suatu agenda, dan panduan dalam berinteraksi di antara aktor yang menempati peran-peran tersebut.³¹

³⁰ Ibid, 18.

³¹ Oran Young, *International Governance*, (Ithaca: Cornell University Press, 1994), pdf.

b. Distribusi kekuasaan (*the distribution of power*)

Distribusi kekuasaan adalah pembagian kekuasaan yang adil di dalam sebuah rezim dimana terdapat suatu pihak dominan yang dapat bertindak sebagai pemimpin namun tidak cukup kuat untuk mengabaikan peraturan yang ada, serta adanya pihak non dominan yang cukup kuat untuk mengontrol pihak dominan.³²

c. Keterampilan dan energi yang tersedia untuk memecahkan masalah yang ada (*the skill and energy available for the political engineering of cooperative solution*)

Keterampilan dan ketersediaan energi dalam menyelesaikan masalah dapat diukur dengan dua pertanyaan; *pertama*, seberapa baik suatu peraturan dan implementasinya dalam memprediksi dan menjelaskan struktur masalah?; *kedua*, sejauh mana keterampilan dan usaha aktor untuk membuat perubahan yang signifikan dalam suatu masalah?³³ Dua pertanyaan tersebut menjadi indikator untuk mengukur keterampilan dan ketersediaan energi aktor terikat dalam merumuskan suatu solusi untuk menangani masalah yang sedang dihadapi.

Ketiga komponen utama di atas merupakan indikator analisis efektivitas rezim internasional. Efektivitas rezim internasional diukur berdasarkan pencapaian indikator-indikator tersebut. Setiap indikator memiliki komponen-komponen tertentu yang menjadi unsur pengukur dari indikator efektivitas rezim internasional, baik dari aspek kolaborasi, aspek kerumitan masalah, maupun aspek kapasitas aktor dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan rezim.

³² Miles, Edward L., et al, pdf.

³³ Ibid.

Sebuah rezim internasional dikatakan efektif apabila telah memiliki seluruh indikator dalam kondisi maksimum yang menjadi parameter di dalam konsep efektivitas rezim tersebut. Sebaliknya, rezim dinyatakan tidak efektif apabila hanya dapat memenuhi satu atau dua saja dari tiga indikator di atas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektif atau tidaknya sebuah rezim internasional dapat diukur dan ditetapkan berdasarkan jumlah indikator yang dimiliki oleh rezim tersebut.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan metode ilmiah yang berisi prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.³⁴ Secara sistematis, metodologi penelitian digunakan untuk menyusun penelitian. Sedangkan secara teknis, metodologi penelitian merupakan cara untuk melakukan penelitian.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi dan menelaah data yang ada dengan melihat pola-pola hubungan dari kelompok data. Dalam menarik kesimpulan, peneliti tidak menggunakan prosedural statistik maupun teknik perhitungan data lainnya. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki pendekatan kualitatif terhadap permasalahan yang dibahas. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah

³⁴ Prof. Dr. Suryana, M.Si, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), pdf.

penelitian yang mengidentifikasi dan mencari pola-pola umum interaksi dalam kelompok data yang dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan.³⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang alasan mengapa sebuah fenomena terjadi di dalam hubungan internasional. Fenomena tersebut dianalisis secara mendalam menjadi lebih terperinci. Fenomena yang dijelaskan di dalam penelitian ini adalah tidak efektifnya ACFTA terhadap industri elektronik di Indonesia, sedangkan hal yang ingin dianalisis adalah mengapa ACFTA tidak efektif terhadap industri elektronik Indonesia. Kedua hal dalam fenomena tersebut dianalisis dengan menggunakan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini berjenis eksplanatif analisis. Penelitian eksplanatif analisis adalah penelitian yang berdasarkan tujuannya mengkaji tentang pengaruh suatu variabel terhadap sebuah fenomena yang terjadi dan ditelaah secara lebih terperinci.³⁶

1. 8.2 Batasan Penelitian

Waktu penelitian ini dibatasi pada tahun 2010 sampai tahun 2015. Tahun 2010 dipilih sebagai patokan awal karena tahun 2010 adalah awal implementasi penuh ACFTA, tepatnya penetapan pajak 0% terhadap perdagangan elektronik yang memicu perlonjakan impor elektronik dari Tiongkok di Indonesia. 2015 merupakan

³⁵ Catherine Marchall dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research 3e*. (California: Sage Publication Inc, 1999), pdf.

³⁶ Jane Ritchie dan Jane Lewis, *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*, (London: Sage Publication, 2003), pdf.

tahun yang memberikan rentang lonjakan impor yang signifikan pasca implementasi ACFTA.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit eksplanasi atau variabel independen merupakan objek yang mempengaruhi unit analisis yang digunakan dalam penelitian.³⁷ Unit eksplanasi dari penelitian ini adalah industri elektronik Indonesia. Industri elektronik Indonesia dilihat sebagai variabel independen yang mempengaruhi efektifitas ACFTA.

Unit analisis atau variabel dependen adalah objek yang perilakunya dijelaskan.³⁸ Unit analisis dari penelitian ini adalah efektifitas ACFTA sebagai sebuah rezim internasional. Hal yang akan dijelaskan terkait dengan efektifitas ACFTA sebagai sebuah rezim internasional adalah penyebab tidak efektifnya ACFTA terhadap industri elektronik Indonesia.

Tingkat analisis adalah sebuah perspektif dalam ilmu Hubungan Internasional yang didasarkan pada sekumpulan aktor atau proses yang sama, yang menyediakan kemungkinan penjelasan yang berhubungan dengan pertanyaan “mengapa”.³⁹ Penelitian ini fokus pada pencarian penyebab dari efektifitas ACFTA terhadap kondisi industri elektronik Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini menganalisis pada tingkat domestik atau *state level*. Tingkat analisis domestik, menurut Goldstein adalah tingkat analisis yang membahas tentang

³⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persamda Press, 2008), 186.

³⁸ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LP3E: Yogyakarta, 1990), 108.

³⁹ Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse, *International Relations ed. 10*, (United States of America: Pearson Education, 2014), 17.

kumpulan kondisi-kondisi domestik suatu negara yang mampu mempengaruhi tindakan negara di dalam arena internasional. Pengaruh ini dilihat dari interaksi aktor yang dapat terjadi melalui organisasi atau agensi pemerintah, perjanjian perdagangan bebas, dan lainnya.⁴⁰

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah penelitian berdasarkan hasil penelitian ataupun informasi yang telah lebih dahulu dimuat di dalam buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁴¹ Pada proses penulisan penelitian ini, kondisi industri elektronik Indonesia dianalisis dari data statistik terkait jumlah kontribusi industri elektronik terhadap PDB Indonesia. Data tersebut diperoleh dari website resmi pemerintah Indonesia, yaitu website Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan dan lainnya.

Upaya pemerintah Indonesia dijelaskan dengan data-data berupa kebijakan, pernyataan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan elit politik Indonesia. Data terkait upaya pemerintah Indonesia diperoleh dari website resmi pemerintah Indonesia, seperti website Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Data terkait dengan analisis ACFTA sebagai sebuah rezim internasional diperoleh dari website resmi ASEAN dan website Kementerian Luar Negeri Indonesia.

⁴⁰ Ibid hlm. 18.

⁴¹ Umar Suryadi Bakry, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), pdf.

Data yang digunakan untuk menganalisis ACFTA sebagai sebuah rezim internasional adalah berupa dokumen ACFTA, laporan kondisi elektronik Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya ACFTA, serta kondisi neraca perdagangan elektronik Indonesia dan Tiongkok. Data-data pendukung diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil survei, berita dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang mampu mendukung proses analisis penelitian ini. Seluruh data tersebut digunakan untuk pembuktian hipotesis penelitian ini.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dipilah dengan menggunakan strategi analisis data sekunder, yaitu sebuah strategi penelitian yang menggunakan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada sebelumnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.⁴² Informasi dari data sekunder tersebut dipilah dengan seksama sesuai dengan sumber yang relevan yang dapat membantu peneliti dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian data dibagi ke dalam beberapa kategori yang disesuaikan dengan variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian ini serta melakukan interpretasi informasi yang sudah dikategorikan.

Data sekunder yang telah dipilah kemudian dianalisa dengan cara menelusuri tindakan atau interaksi proses yang terjadi dalam fenomena internasional. Proses pertama yang ditelusuri adalah perubahan yang diakibatkan oleh fenomena yang

⁴² Andrews, et al, "Classic Grounded Theory to Analyze Secondary Data: Reality and Reflection," *The Grounded Theory Review* 11, no. 1 (2012): 5.

terjadi. Proses kedua adalah respon berupa strategi aksi atau interaksi yang muncul dikarenakan oleh perubahan yang ada. Selanjutnya, data dikelompokkan sehingga menggambarkan suatu pola penelitian. Pola-pola tersebut dianalisa sesuai dengan kerangka konsep penelitian untuk menarik kesimpulan, sehingga peneliti dapat menjelaskan secara mendetail seluruh hasil, aspek dan fakta yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteiti.

Sesuai dengan konsep analisis data yang digunakan, maka untuk menjelaskan proses pertama, peneliti membahas efektivitas ACFTA dengan menggunakan konsep efektivitas rezim yang diukur dari indikator kerumitan masalah. Tingkat kerumitan masalah dianalisis dengan menggunakan data yang diambil dari website resmi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Indonesia. Data yang digunakan adalah data statistik yang memberikan informasi terkait kondisi industri elektronik Indonesia pada saat sebelum dan sesudah diberlakukannya ACFTA.

Proses kedua analisis data dilakukan untuk menjelaskan indikator tingkat kolaborasi dan indikator kapasitas penyelesaian masalah. Indikator tingkat kolaborasi dijelaskan dengan melihat hubungan sebab-akibat dari *output*, *outcome* dan *impact*. Ketiga hal ini dianalisis dari data-data berupa dokumen dan cetak biru ACFTA, serta kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam kerja sama perdagangan internasional yang diatur oleh ACFTA. Sedangkan indikator kapasitas penyelesaian masalah memiliki tiga parameter, yakni pengaturan kelembagaan, distribusi kekuasaan, serta keterampilan dan energi yang tersedia untuk memecahkan masalah yang ada. Untuk menganalisa tiga parameter ini, data yang digunakan adalah

berupa dokumen resmi yang berisi tentang aturan-aturan bersama yang disepakati di dalam ACFTA, kebijakan-kebijakan ekonomi serta tindakan pemerintah Indonesia.

1. 9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjelasan tentang kerangka umum penelitian yang dilakukan. Kerangka tersebut memuat isi dari penelitian secara keseluruhan. Sistematika penulisan juga menjelaskan urutan bab beserta pembahasan di dalamnya. Berikut ini adalah pemaparan tentang sistematika penulisan penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu berisi latar belakang penelitian yang berisi tentang kenapa peneliti memilih topik penelitian ini. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, yang menjelaskan secara singkat tentang masalah yang diteliti. Kemudian peneliti memaparkan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang menjelaskan tentang konsep-konsep keilmuan yang sesuai dengan isu penelitian, tinjauan pustaka yang berisi tentang pemaparan beberapa sumber penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian, serta metodologi penelitian yang berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Bagian akhir dari bab ini adalah sistematika penulisan yang memaparkan tentang susunan isi penelitian. Secara keseluruhan, bab satu berisi tentang gambaran umum dan kerangka awal penelitian terkait isu yang diteliti.

BAB II KONDISI INDUSTRI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Bab dua menjelaskan variabel independen, yaitu kondisi industri elektronik di Indonesia. Bab ini membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terdapat pada industri elektronik Indonesia pada saat sebelum dan setelah dibelakukannya ACFTA. Masalah –masalah yang dijabarkan akan didukung dengan data dan fakta yang dikumpulkan peneliti berdasarkan metode penelitian yang peneliti gunakan.

BAB III *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* (ACFTA) SEBAGAI SEBUAH REZIM INTERNASIONAL

Bab ini membahas tentang tujuan dan landasan dibentuknya ACFTA, analisis ACFTA sebagai sebuah rezim internasional, dan implementasi ACFTA. Pembahasan tujuan dan landasan ACFTA dijelaskan sesuai dengan data dan informasi yang peneliti peroleh dari website resmi ASEAN dan sumber literatur lainnya. Pembahasan dilanjutkan dengan penerapan konsep rezim internasional dalam menganalisis ACFTA sebagai sebuah rezim internasional di kawasan Asia Tenggara. Pembahasan terakhir pada bab ini adalah tentang implementasi dan pelaksanaan fungsi dari ACFTA sebagai sebuah rezim.

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* (ACFTA) TERHADAP SEKTOR INDUSTRI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Bab ini membahas mengenai efektivitas ACFTA terhadap industri elektronik Indonesia. Bagian awal bab ini menjelaskan ketidakefektifan ACFTA terhadap industri elektronik Indonesia. Kemudian, dilanjutkan dengan analisis penyebab tidak

efektifnya ACFTA terhadap industri elektronik Indonesia. Analisis terhadap efektifitas ACFTA akan dijelaskan dengan menggunakan teori efektifitas rezim seperti yang telah dipaparkan dalam kerangka konseptual.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.

